

PERAN MODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA HUBUNGAN KOMPETENSI PENGELOLA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Mohammad Ridwan¹, R. Ery W.A. Santosa², Sulistyio Suharto³, Anindya P.R.Z. Putri⁴

^{1,2,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang

³Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

⁴Departemen of Finance, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan

ridwan14@unimus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh moderasi partisipasi masyarakat pada hubungan kompetensi pengelola dana desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Objek penelitian pada kuasa pengguna anggaran dana desa di Kabupaten Rembang dengan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data melalui pendekatan Partial Least Square (PLS), dengan bantuan software WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan dana desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan negatif sebagai variabel moderasi antara kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan positif sebagai variabel moderasi antara sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dana Desa

Abstract

This study examines the influence of village fund management requirements, internal system control, and information technology utilization on the accountability of village fund management with community participation as a moderating variable. The object of research is the power of village fund users in Rembang Regency using a purposive sampling method. The research method used is the method of data analysis through the Partial Least Square (PLS) approach, with the help of WarpPLS software. The results of the study show that village fund management competencies, internal control systems, and the use of information technology have no effect on the accountability of village fund management. Community participation has a significant negative effect as a moderating variable of competence of village fund managers on village fund management accountability, community participation has a significant positive effect as a moderating variable of internal control systems, and use of information technology on village fund management accountability.

Keywords: Community Participation, Accountability, Village Funds

PENDAHULUAN

Dana desa menjadi salah satu instrumen penting pemerintah Indonesia dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Nasional tahun 2020-2024. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan wewenang serta tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan desa guna percepatan pemberdayaan desa (Sarah et al., 2020). Pengelolaan dana desa diharapkan mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan secara bertahap dari desa berkembang menjadi desa mandiri, mengurangi angka kemiskinan. Indikator

penting atas serapan dan realisasi dana desa antara adalah peningkatan keadaan pembangunan infrastruktur yang ada, sumber daya manusia yang berkualitas, tingkat kesejahteraan masyarakat serta layanan publik akuntabilitas lebih baik (Sofyani et al., 2022).

Dana desa menjadi langkah strategis dan sekaligus komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional melalui desa, daerah pinggiran dan perbatasan (Bawono et al., 2020). Pagu dana yang besar pada dana desa dengan jumlah tujuh puluh satu triliun rupiah tahun 2020, tujuh puluh dua triliun rupiah tahun 2021 dan enam puluh delapan triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi

sumber yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Peningkatan *quality control* dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) saat ini masyarakat perlu memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah terkait pemulihan dibidang ekonomi, pendidikan hingga dengan Kesehatan hal ini digunakan untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dari pemerintah pusat (Sarifah et al., 2019).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi tolok ukur dan poin fokus bagi setiap aparatur pengelolanya yang menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa (Bawono et al., 2020). Pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik harus mampu melayani masyarakat dalam mengelola desanya serta menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sebaik-baiknya diantaranya melalui kompetensi pengelola desa, sistem pengendalian dan pemanfaatan teknologi informasi (Sarah et al., 2020).

Kompetensi pengelola merupakan komponen dasar dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas pada kinerjanya yang baik (Atmadja et al., 2018). Sesuai dengan temuan (Sarah et al., 2020); (Bawono et al., 2020); (Budiana et al., 2019); (Mada et al., 2017) bahwa kompetensi pengelola berpengaruh terhadap penentuan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, hasil dari penelitian (Widyatama et al., 2017) menunjukkan bahwa kompetensi pengelola ternyata tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan selain kompetensi pengelola adalah sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi (Sarah et al., 2020). Sistem pengendalian intern yang baik maka akan member dampak baik yakni meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan (Bonsu et al., 2022). Sesuai temuan dari (Budiana et al., 2019) (Atiningsih & Ningtyas, 2019), bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun berbeda yang ditemukan (Dewi et al., 2021); (Pahlawan et al., 2020) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi sistem pengendalian internal. Disisi lain (Pahlawan et al., 2020) menemukan hasil penelitiannya yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam pengawasan pengelolaan Sarah, et al. (2020) menyampaikan dalam penelitiannya dia menyampaikan penggunaan teknologi informasi

dan partisipasi masyarakat mempengaruhi efek positif akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Semakin baik partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Pangayow & Patma, 2021). Karena jika masyarakat aktif dalam mengidentifikasi masalah dan pemilihan serta pengambilan keputusan maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal itu di dukung oleh penelitian (Mada et al., 2017) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat memberikan peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa serta meningkatkan daripada pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan pengaruh kompetensi pengelola, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Rembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Agency theory (teori agensi) yaitu tentang korelasi antara manajemen (agen) dengan investor (prinsipal) yang awalnya diungkapkan oleh Jensen and Meckling (1976). Menurut teori keagenan, agen memiliki otoritas pengambilan keputusan dalam hubungan kontraktual di mana dalam hal ini seseorang atau lebih (principal) memberikan pekerjaan kepada orang lain (agen) untuk melaksanakan layanan atas nama perusahaan mereka. Pihak prinsipal meneliti kembali terkait perbedaan keperluannya dengan menetapkan kompensasi yang tepat untuk agen serta menginvestasikan biaya pemantauan ditargetkan guna meminimalkan aktivitas menyimpang agen, prinsipal dapat membatasi perbedaan dari kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976)

Pengelola dana desa memiliki potensi tinggi menciptakan *asymmetric information* di dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa, diantaranya pelaporan keuangan yang akuntabel (Sarah et al., 2020). Partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal berjalannya perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan dengan baik sekaligus mengantisipasi tindakan penyelewengan (Pangayow & Patma, 2021)(Putri, 2018). Adanya partisipasi masyarakat juga diharapkan akan menambah kinerja pemerintah desa yang telah didukung oleh kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi yang ada.

Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan BPKP RI (2000:12) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, atau menjawab dan menjelaskan, kegiatan dan tindakan seseorang/pemimpin atau pimpinan unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta pertanggungjawabannya. Akuntabilitas adalah suatu jenis kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan tertentu melalui sarana pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Yesinia et al., 2018). Akuntabilitas merupakan isu penting bagi masyarakat, dan administrasi bisnis dan publik, karena mereka bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan atas kinerja mereka (Widyatama et al., 2017).

Akuntabilitas merupakan komponen penting yang harus dimiliki perusahaan dan badan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (Umaira & Adnan, 2019). Melihat data dari (Sarah et al., 2020) bahwa Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur tentang pemerintahan desa untuk mengelola dana desa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, anggaran, dan disiplin (Bawono et al., 2020).

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Sofyani et al., 2022). Menurut Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Dewan Negara/Kota untuk desa, paling sedikit 10% dari jumlah tersebut. distribusi. sebanding dengan 1 untuk kota-kota.

Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah No. 37 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2007, ditetapkan bahwa pengalokasian dana desa dilakukan dengan APBD Negara/Kota yang diperoleh dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah. Untuk Deputi Pemerintah/Kelurahan paling sedikit 10%. Perekonomian desa dapat dibedakan menurut jenis pengelolaannya menjadi perekonomian desa yang dikelola langsung berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan perekonomian desa yang dikelola secara terpisah

oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pemerintahan desa sebagai organisasi sektor publik harus mampu melayani masyarakat dalam mengelola desanya serta menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sebaik-baiknya diantaranya melalui kompetensi pengelola desa, sistem pengendalian dan pemanfaatan teknologi informasi (Sarah et al., 2020).

Kompetensi Pengelola Dana Desa

Kompetensi adalah bentuk karakteristik yang mendasari seseorang, dalam hal ini diharapkan seseorang memiliki kinerja yang efektif. Pengukuran variabel kompetensi pengelola dana desa menggunakan indikator pengukuran yang telah digunakan oleh (Aziiz & Prastiti, 2019). Kompetensi pengelola aparatur desa menjadi syarat mendasar dalam berjalannya pemerintahan desa diantaranya kompetensi dalam bidang keuangan dana desa (Budiana et al., 2019).

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah sebuah proses yang terintegral pada perilaku dan kehidupan yang dikerjakan secara terus menerus untuk membantu tercapai tujuan dari organisasi yang ada berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. Pengendalian internal merupakan sejumlah prosedur sistematis sesuai peraturan yang ditetapkan guna mengawal kinerja organisasi (Budiana et al., 2019). Pengawasan merupakan salahsatu bentuk pengendalian yang secara langsung akan berdampak kepada efisiensi serta peningkatan kinerja organisasi (Aikins, 2011).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi merupakan instrumen yang menjadi bagian utama yang digunakan untuk membantu pekerja untuk mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi bentuk informasi yang mudah dipahami dan digunakan sebagai bahan pengambilan tindakan/ keputusan guna memberikan pelayanan yang baik kepada publik (Aulia et al., 2018). Teknologi akan mampu membantu percepatan pelayanan dan meningkatkan performa dari pemerintah desa sehingga akan mendorong peningkatan kinerja termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sarah et al., 2020).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi individu secara sadar dalam kegiatan dan keadaan tertentu yang terjadi dengan cara yang berbeda antara individu dan individu lain atau individu dan kelompok, dan berbagi semua jenis

informasi. (Mada et al., 2017). Pengukuran variabel partisipasi masyarakat menggunakan indikator pengukuran yang telah digunakan oleh Mada, et. al. (2017).

Penentuan kebijakan publik akan baik jika disertai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi instrumen yang membantu pencegahan pada potensi kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Sofyani et al., 2022). Selain itu hal tersebut menjadi motor penggerak percepatan pelaksanaan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Kompetensi Pengelola (Aparatur) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peralatan yang berkualitas membawa hasil yang baik sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Pengetahuan yang baik meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang prosedur pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaannya yang tepat, sehingga membuat pengelolaan sumber daya desa lebih akuntabel (Hoekstra et al., 2022). Jika perangkat desa tidak memahami hal ini, maka berdampak pada kesalahan laporan keuangan dan penyimpangan laporan dari standar yang ditetapkan pemerintah, yang berdampak pada keputusan-keputusan berikutnya, yang tetap tidak mencerminkan tanggung jawabnya. Milik. Kualifikasi bendahara desa merupakan prasyarat terpenting agar tanggung jawab desa dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sarah et al., 2020), (Aulia et al., 2018), (Atiningsih & Ningtyas, 2019) dan (Budiana et al., 2019), (Rahayu & Setiyawati, 2021), juga dengan penelitian (Mada et al., 2017).

H1 : Kompetensi Pengelola berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal yang mumpuni dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan peningkatan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Selain itu, sistem pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan yang dibuat lebih akuntabel. Sistem pengendalian intern juga mengendalikan kegiatan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, menghindari manipulasi angka yang merugikan masyarakat dan negara, serta memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Bonsu et al., 2022), (Sarifah et al., 2019), (Atiningsih & Ningtyas, 2019) (Budiana et al., 2019) (Widyatama

et al., 2017) (Sarifah et al., 2019) aparatur yang kompeten akan menghasilkan output yang baik.

H2: SPI berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik berdampak positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan kas desa. Teknologi informasi memiliki keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Penggunaan teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pengelolaan informasi. Berkat teknologi informasi, informasi yang diolah memudahkan pengelolaan perangkat dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Sarah et al., 2020), (Aulia et al., 2018) (Widyatama et al., 2017).

H3: Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat atas Hubungan Kompetensi Pengelola pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peran partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan yang nanti akan diambil oleh aparatur pemerintah desa sangatlah penting. Partisipasi masyarakat yang proporsional akan mampu memberikan dampak positif pada pembentukan whistleblowing system tingkat desa. Masyarakat dapat merespon keputusan dan tindakan pengurus agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sehingga akuntabilitas yang tercipta akan membawa pada tercapainya tujuan desa dengan baik (Hoekstra et al., 2022).

Berdasarkan temuan (Sarah et al., 2020) Partisipasi masyarakat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Hal tersebut akan berdampak pada pengawasan kinerja pengelola dan meminimalisir kesalahan teknis sehingga capaian yang diharapkan dapat diwujudkan (Rahayu & Setiyawati, 2021). Dari data tersebut dapat diambil hipotesis:

H4: Kompetensi pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui peran partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderasi

Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat atas Hubungan SPI pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang menyeluruh terkait dengan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seluruh karyawan dan pimpinan internal, yang memberikan keyakinan atas keberhasilan aktivitas yang dilakukan (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Ketika karyawan adalah orang yang kompeten dan dapat diandalkan,

pengendalian internal tidak menimbulkan masalah dan mengarah pada laporan keuangan yang andal (Sofyani et al., 2022). Pengetahuan perangkat desa berdampak langsung terhadap pelaksanaan pengendalian intern, dan menurut penelitian (Bawono et al., 2020), pengetahuan manajemen sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengendalian intern. Pengendalian internal organisasi mempromosikan penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi.

Partisipasi masyarakat secara langsung akan meningkatkan pengawasan sehingga pengendalian semakin baik. Pengendalian internal yang semakin baik nantinya akan berdampak pada akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi (Bonsu et al., 2022). Dari data tersebut dapat diambil hipotesis:

H5: SPI berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana melalui peran partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderasi.

Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat atas Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa harus dikelola dengan tepat dan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat (Bawono et al., 2020). Pemerintah desa berkewajiban mengelola kas desa yang ada. Informasi kualifikasi yang baik sangat diperlukan bagi perangkat desa dalam pembangunan berbagai aspek. Mesin desa harus menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan dan perilaku untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang optimal (Budiana et al., 2019).

Pemerintah desa sebagai penyelenggara terdorong untuk bertindak secara bertanggung jawab, jujur, dan adil kepada setiap pihak. Masyarakat merupakan pihak utama yang harus diberikan pelayanan dan jaminan dalam berpartisipasi aktif sesuai amanat yang telah diberikan. Sumber daya teknologi informasi desa yang kompeten dan memadai memberikan hasil yang sama baiknya sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap tanggung jawab pengelolaan sumber daya desa, hal ini dapat diartikan bahwa semakin kompeten pemerintah desa maka semakin bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab kebidanan desa, semakin kompeten perangkat desa tersebut, maka akan berpengaruh terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan

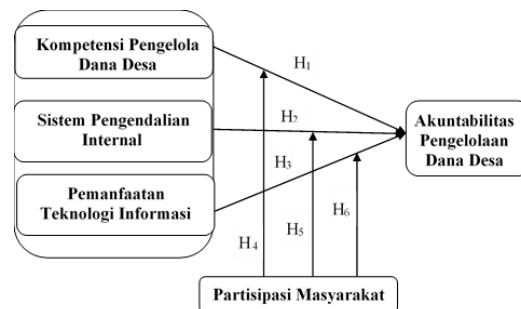
desa. Dari data tersebut dapat diambil hipotesis:

H6: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui peran partisipasi masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan populasi penelitian ini adalah perangkat desa Kabupaten Rembang yang mengelola keuangan desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Sampel penelitian ini adalah aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pengurus desa, kepala tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan di 10 desa di Kabupaten Rembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah pendapat individu atau kelompok tentang variabel yang terkait dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Squares (PLS) dengan analisis data menggunakan software WarpPLS. Data disajikan, diolah dan dianalisis dalam statistik diskriptif, uji validitas dan reliabilitas serta uji hipotesis. Adapun secara rinci *conceptual framework* penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Conceptual Framework Penelitian

Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode untuk mengolah hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur dengan menggunakan model partial least square (PLS). Model ini sering disebut dengan PLSSEM karena menggunakan model persamaan struktural (SEM) sebagai model persamaannya. Survei ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0 untuk mengolah dan menganalisis data survei.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan hasil analisis data suatu penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman. Tabel statistik deskriptif biasanya memberikan informasi tentang hasil analisis data, yang terdiri dari:

Nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, jumlah data yang diproses serta standar deviasi dipaparkan. Statistik deskriptif penelitian ini yakni hasil analisis data penelitian yang rinci jawaban responden, dinyatakan dalam bentuk skala Likert. Hasil tersebut kemudian dijelaskan menurut kriteria skala Likert yang ada

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas berada pada tahap evaluasi model. Dalam hal ini, PLS-SEM melalui dua tahapan, yaitu estimasi pengukuran dan estimasi model struktural.

a. Outer Model

Evaluasi model evaluasi atau model eksternal dilakukan untuk mengukur reliabilitas dan validitas indikator-indikator penyusun konstruklaten.

b. Inner Model

Evaluasi model struktural atau model internal memprediksi hubungan antara variabel laten, yang dapat dilihat dari varians yang dijelaskan, dan menentukan signifikansi nilai-p. Saat mengukur model struktural, kuadrat-R dari setiap variabel laten endogen diketahui.

3. Uji Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian disebutkan bahwa rancangan uji hipotesis layak adalah rancangan uji hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga batas ketelitian atau ketidakpastiannya adalah $(\alpha) = 5\% = 0,05$ sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,98. Jika nilai t-statistik $< 1 > 1,98$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu partisipasi masyarakat, kemudian kami menguji apakah variable partisipasi masyarakat dapat memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji Pilot Test yang digunakan untuk menilai instrumen penelitian memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya diuraikan demografi sampel yang menjelaskan karakteristik

responden penelitian dan data penelitian yang terkumpul, analisis deskriptif, pengujian Outer Model, pengujian Inner Model dan pada akhir bab ini menjelaskan pembahasan hipotesis.

Data selama pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

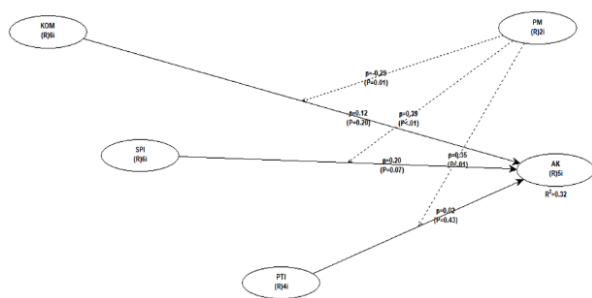
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

Rinci an	Posisi					Tota l	% I
	Kad es	T U	Pe m	Sekd es	Keu		
1 Pendidikan							
a SM A	7	8	8	6	10	39	78%
b D3	1	1	1	2	0	5	10%
c S1	2	1	1	2	0	6	12%
d S2	0	0	0	0	0	0	0%
e S3	0	0	0	0	0	0	0%
Jumlah						50	100%
2 Masa Tugas Kerja							
a 1-5 tahun	10	3	2	6	8	29	58%
b 5-8 tahun	0	3	3	3	2	11	22%
c 8-10 tahun	0	2	1	0	0	3	6%
d >10	0	2	4	1	0	7	14%
Jumlah						50	100%

Data diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada aparatur desa di Kabupaten Rembang sebanyak 10 desa, dengan masing-masing desa terdiri dari Kepala Desa, Tata Usaha dan Umum, Staf Pemerintahan Desa, Sekertaris Desa, dan Keuangan sebagai sampel penelitian. Kuesioner dikirim langsung kepada responden dengan cara mengirim tim survey langsung ke desa dan juga melalui G form yang diisi oleh pengelola desa di Kabupaten Rembang.

Setelah data diperoleh selanjutnya di olah menggunakan metode yang telah ditentukan yaitu melalui pendekatan Partial Least Square (PLS), dengan bantuan software WarpPLS. Uji koefisien jalur menentukan seberapa tinggi nilai estimasi koefisien jalur dengan melihat nilai β , sedangkan uji signifikansi digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien jalur, dengan ketentuan nilai P harus lebih kecil dari 0,05. yang tercermin dalam koefisien jalur keluaran dan nilai P.

Gambar 4. 1 Uji Path Analysis Model



Setelah data diperoleh selanjutnya di olah menggunakan metode yang telah ditentukan yaitu melalui pendekatan Partial Least Square (PLS), dengan bantuan software WarpPLS. Dalam penelitian yang diuji hubungan antara Kompetensi pengelola dana desa, Sistem Pengendalian Internal, Penggunaan teknologi dan adanya variable moderasi yaitu Partisipasi masyarakat, hasil dari uji path dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Path Analysis

Uraian	Nilai β	P-Value	Keterangan
KOM_AK	0,115	0,199	Tidak berpengaruh
SPI_AK	0,197	0,070	Tidak berpengaruh
PTI_AK	0,025	0,431	Tidak berpengaruh
PM*KOM_AK	-0,288	0,014	Berpengaruh
PM*SPI_AK	0,393	0,001	Berpengaruh
PM*PTI_AK	0,349	0,003	Berpengaruh

Berdasarkan hasil koefisien jalur output dan P-value diperoleh poin β -KOM sebesar 0,115 serta P-value KOM sebesar 0,199, menampilkan bahwa kemampuan manajer tidak pengaruh signifikan. Kemudian PTI- β -value sebesar 0,025 serta poin P-value dari PTI yakni 0,431, menginformasikan bahwasanya tidak ada efek yang signifikan dari PTI. Nilai β dari PM*KOM sebesar -0,288 serta poin P dari PM*KOM sebesar 0,014, menampilkan bahwa PM*KOM punya pengaruh negatif signifikan. Selanjutnya nilai PM*SPI- β sebesar 0,393 dan nilai PM*SPI-P yakni 0,001, mengisyaratkan PM*SPI memiliki pengaruh yang begitu signifikan positif, kemudian pain dari β -PM*PTI sebesar 0,349 adapun poin dari P PM*PTI yakni 0,003, menjelaskan PM*PTI memiliki pengaruh yang signifikan positif pada akuntabilitas.

Pembahasan

Dari hasil olah data serta analisis diketahui informasi sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Pengelola pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uji signifikansi serta uji koefisien jalurnya data menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan entitas desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan entitas desa, dibuktikan dengan nilai β yakni 0,115 serta nilai P sebesar 0,199. Kompetensi membangun memiliki beberapa komponen yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Haltersebut penting untuk dapat dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Budiana et al., 2019).

Dalam teori keagenan, hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen). Hubungan principal-agent dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena agent mungkin memiliki lebih banyak informasi daripada principal, yang mendorong agent untuk bertindak secara terbuka dan kurang akuntabel terhadap kewenangannya. Pengurangan konflik jabatan tidak hanya membutuhkan kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kas desa. Namun, faktor tambahan diperlukan agar semua kegiatan administrasi kas desa diperhitungkan dan konflik kegiatan diselesaikan. Hasil observasi mendukung penelitian (Widyatama et al., 2017) yakni keahlian tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan sumber daya desa.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian intern dan kekuatan koefisien jalur menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab kas desa, dibuktikan dengan koefisien jalur yang dihasilkan pada poin dari β yakni 0,197 dan nilai P dari 0,070.. Sesuai pesan Aikins (2011) yang menyatakan bahwa supervisi dari pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dengan mengevaluasi dan meningkatkan pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses manajemen instansi.

Penyimpangan dan kebocoran masih sering terjadi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kecurangan pengelolaan dana desa (Ikbal et al., 2020). Pengenalan sistem kontrol internal memungkinkan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat mempengaruhi tanggung jawab dan transparansi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Dewi et al., 2021) dan (Pahlawan et al., 2020) bahwa sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan aset desa.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

menurut signifikansi koefisien jalur dan variabel pemanfaatan teknologi informasi tak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tanggung jawab kas desa, dilihat menurut poin dari β yakni sebesar 0,025 serta nilai P sebesar 0,431. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, maka semakin akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut BPKP, keuangan desa sangat besar, jumlah laporannya fluktuatif dan terdapat titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa yang juga membutuhkan tanggung jawab yang besar dari pemerintah desa (Aulia et al., 2018). Kepala desa harus mampu menerapkan prinsip tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa yang pelaksanaannya memerlukan dukungan kemampuan teknologi informasi yang memadai dan handal. Hasil penelitian sejalan dengan temuan (Pahlawan et al., 2020) bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab pengelolaan kekayaan desa.

4. Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji koefisien jalur dan signifikansi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan sebagai variabel moderasi pengaruh kompetensi pengelola dana desa tentang tanggung jawab pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan nilai β -0,288 dan nilai P 0,014. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Aulia et al., 2018); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Sarah et al., 2020) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran positif terhadap akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa. Artinya, masyarakat lebih banyak terlibat dalam manajemen dana desa akan memperkuat kompetensi dari komponen aparatur itu sendiri dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Semakin masyarakat berpartisipasi pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring program desa berarti aparatur juga harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa (Pangayow & Patma, 2021). Oleh karena itu, perangkat desa cenderung berfungsi dengan baik dalam hal kemajuan pemerintahan desa. sebaliknya jika masyarakat kurang ikut serta dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program desa, maka aparatur desa cenderung akan bekerja kurang baik. Maka, dengan demikian dapat difahami bahwa semakin tinggi keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa semakin rendah kecenderungan potensial untuk penipuan dan pengelolaan dana desa juga akan semakin akuntabel (Sofyani et al., 2022).

5. Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uji koefisien jalur dan signifikansi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel moderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tanggung jawab pengelolaan aset desa yang ditunjukkan melalui angka dari β yakni 0,393 serta angka dari p-value adalah 0,001. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa maka akan berdampak pada meningkatnya sistem pengendalian intern sehingga dapat meminimalkan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) seringkali Berdasarkan uji koefisien jalur dan signifikansi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel moderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap tanggung jawab pengelolaan aset desa yang ditunjukkan dengan nilai β yakni 0,393 serta nilai P-value dari 0,001. (Budiana et al., 2019). Dalam rangka mengurangi konflik tersebut maka perlu adanya pengawasan baik dari dalam maupun dari luar sehingga dari pengawasan tersebut mampu meminimalkan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat mempengaruhi transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Didukung penelitian (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Nawawi & Salin, 2018), SPI memiliki berpengaruh positif terhadap akuntabilitas yang didukung dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa.

6. Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uji koefisien jalur dan signifikansi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi tanggung jawab pengelolaan kekayaan desa yang ditunjukkan pada nilai β yakni sebesar 0,349 serta P-value pada angka 0,003. Kepala desa harus dapat menerapkan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang pelaksanaannya memerlukan dukungan keterampilan teknologi informasi yang memadai

agar desa dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pelaksanaan desa. Pengelolaan instansi (Aulia et al., 2018) transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa mengarah pada masyarakat. Responsif ini mengacu pada keterlibatan masyarakat, yang dapat memberikan umpan balik atau masukan untuk meningkatkan pengembangan pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan desa (Bonsu et al., 2022).

PP No. 56/2005 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Sarah et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah pembukuan pengelolaan keuangan kas desa. Menurut penelitian (Aulia et al., 2018), penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap tanggung jawab dalam menangani sumber daya desa. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan desa ke arah yang lebih baik melalui pengawasan dan pendampingan secara aktif, sehingga penggunaan teknologi informasi mempermudah penyampaian layanan dan memenuhi tanggung jawab pengelolaan sumber daya desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh kompetensi pengelola dana desa, sistem pengendalian intern, penggunaan teknologi informasi. Adapun partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi mampu berpengaruh negatif signifikan terhadap kompetensi pengelola dana desa terhadap realisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi mampu berpengaruh positif signifikan hubungan sistem pengendalian intern penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dari dana desa.

Saran

Melihat data penelitian dan hasil analisisnya, dapat diajukan saran yakni bagi masyarakat desa diharapkan dapat mengontrol kegiatan perangkat desa terutama dalam pelaksanaan dan pengurusan rumah tangga desa. Selain itu, kepala desa harus lebih terlibat dalam penggunaan teknologi informasi. Meningkatkan keterampilan dan keahlian perangkat desa melalui pelatihan atau pengetahuan teknologi informasi. Bagi peneliti dapat menjelaskan variabel lain yang diduga

mempengaruhi perilaku hedonistik, seperti gaya hidup, pendapatan orang tua atau pribadi, gaya hidup, lingkungan internal dan eksternal, pengendalian diri, dan religiusitas. Perluasan bidang penelitian sehingga pengambilan sampel menjadi lebih beragam dan serbaguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, S. K. (2011). An examination of government internal audits' role in improving financial performance. *Public Finance and Management*, 11(4), 306. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.303756232&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip.uid>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 10(1), 14–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182>
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1).
- Aulia, P., Agusti, R., & Julita. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 1(3), 1–15.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/8097/pdf>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Bonsu, A. B., Appiah, K. O., Gyimah, P., & Owusu-afriyie, R. (2022). Public sector accountability: do leadership practices, integrity and internal control systems matter? *IIM Ranchi Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/IRJMS-02-2022-0010>
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The Effect of Village Device Competencies and

Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal*, VII(I), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>

Dewi, Y. A., Nasfi, & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 190–203. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>

Hoekstra, A., Huberts, L., & Montfort, A. Van. (2022). Content and Design of Integrity Systems: Evaluating Integrity Systems in Local Government Content and Design of Integrity Systems: Evaluating Integrity. *Public Integrity*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/10999922.2021.2014204>

Ikbal, M., Irwansyah, I., Paminto, A., Ulfah, Y., & Darma, D. C. (2020). Explores the Specific Context of Financial Statement Fraud Based on Empirical from Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 8(2), 29–40. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2020.080201>

Jensen & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>

Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2018). Internal control and employees' occupational fraud on expenditure claims. *Journal of Financial Crime*, 25(3), 891–906. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-07-2017-0067>

Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/iaj.29261>

Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, Accountability and Reporting of Village Financial Management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203.

<https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090208>

Putri, C. M. (2018). Does Type of Fraudulent Act Have an Impact On Whistleblowing Intention? *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 210–225. <https://doi.org/10.18196/jai.1902102>

Rahayu, P., & Setiyawati, H. (2021). The Influence of Apparatus Competence and Organizational Commitment on the Quality of Village Funds Financial Reports. *Proceedings of the 1st MICOSS Mercuru Buana International Conference on Social Sciences*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-9-2020.2307534>

Sarah, S., Taufik, T., Safitri, D., & Riau, U. (2020). The Effect of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Community Participation and Internal Control systems of the Accountability of Village Management in Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Efektive Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i2.20581>

Sofyani, H., Yaya, R., & Widiastuti, H. (2022). The Story of Rising Corruption Post-Village Government Reform - A View of Three Theories: Fraud, Managerial Hegemony, and Culture. *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 101–119. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16462>

Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya) 1,2. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/12580/5119>

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20.

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sistem Pengendalian Internal juga Pengelolaan Keuangan Desa ialah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>